

PLATON: KEMUNGKINAN “POLIS-DIKAIOS” DAN “INDIVIDU-DIKAIOS” (BUKU V)

Oktovianus Kosat

Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira
Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes – Penfui – Kupang - NTT
Email: kosatkote11@gmail.com

Abstract

“For what we laid down in the beginning as universal requirement when we were founding our city, this i thing, or some form of this, is justice. And what we did lay down, and often said, if you recall, was that each one man must perform one social service in the state for which his nature was best adapted. And we said again that to do one’s own business and not to be a busybody is justice”.

Kata kunci: kota (*polis*), keadilan (*dikaios*), individu, kemungkinan (*possibility*).

1. Pendahuluan

Politeia merupakan karya Platon yang paling sentral. Masalah dan pencarian utama yang ditampilkan dan sekaligus diperdebatkan adalah *hakikat keadilan*; apa itu *dikaiosune*, bagaimana nasib orang *dikaios*? Dan *dialog* menjadi salah satu langkah dalam usaha Platon untuk mencapai pencarian ini melalui ketegangan antara tradisi (*nilai tradisional*; yang diwakili oleh *Kephalos – Polemarkhos* dan *Lysias*), dan kebaruan (*intelektualisme Sofis*; yang diwakili oleh *Thrasymakhos*) dan di antara mereka ada para filsuf (*Sokrates* dan saudara-saudara Platon: *Glaukon* dan *Adeimantos*).¹

Bertolak dari pencarian umum tentang keadilan, perdebatan pun dimulai dengan munculnya seorang guru retorika yang bijak (*Thrasymakhos*), yang menunjukkan sebuah drama dan perbincangan filosofis yang sangat dramatik. Dibekali pengetahuan yang mendalam, *Thrasymakhos* mengungkapkan pendapatnya tentang keadilan. Bahwa, apa yang kita sebut sebagai keadilan tidak lain adalah kepentingan pribadi. Pendapat yang sangat sinis tentunya, di mana keadilan itu tidak lebih daripada kepentingan pihak yang kuat. Di sana, penguasa adalah diktator yang memaksakan kepada rakyat sebagai hukum yang adil apa yang sebenarnya menguntungkan bagi dirinya sendiri.² Melalui jalan dialog, Platon mengembangkan pencarian ini, meskipun Platon sendiri berpendapat bahwa sifat dasar keadilan agak sulit dijelaskan. Berada dalam kesulitan ini, Platon mengusulkan tempat terbaik untuk melihat keadilan yakni

¹A. Setyo Wibowo, *Tokoh-Tokoh, Waktu Dramatis dan Penulisan Politeia*, (Jakarta: Kuliah Politeia – Pascasarjana Driyarkara, 2011), hal. 1.

²Frans Magnis-Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 13.

di dalam kota yang adil.³ Sebagaimana terungkap dalam keberatan Adeimantos tentang polis ideal, dan merupakan hal yang sulit untuk dicapai, dijawab Sokrates dengan mengajak untuk menyelidiki soal keadilan ini dilevel yang lebih besar: yakni polis/negara-kota.⁴ Ketika kota dan individu-individu sungguh adil, apa yang benar pada orang tertentu seharusnya memberikan kebenaran bagi orang lain.

Kepiawaian Platon dalam upaya pencarian keadilan ini, terlihat dalam penempatan sosok Sokrates dalam dialognya yang langkah demi langkah memaksa Thrasymakhos untuk menjelaskan, membatasi dan akhirnya menarik pernyataannya tentang keadilan; bahwa, keadilan bukan sekedar asap kepentingan para penguasa, melainkan prasyarat kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka keadilan adalah keutamaan terpenting yang harus dikejar.⁵

2. Pembahasan

2.1 Platon: Pandangan Umum Tentang Keadilan

Dimulai dengan kisah tentang *cincin Gyges*, Glaukon mengajak kita untuk melihat arti 'keadilan' dalam pemaparannya yang bernada pesimis; apakah keadilan adalah sebuah kebaikan *in itself* yang dicari; atau keadilan itu dicintai karena *effects* baiknya yang membahagiakan; atau keadilan itu sebuah kebaikan yang dicari "*for its own sake and for its consequence*". Platon sendiri memberi jawaban atas pesimisme Glaukon ini dengan mengatakan bahwa 'keadilan' adalah sebuah '*excellence*' (keutamaan), sebuah kebaikan yang dipilih karena 'dalam dirinya sendiri baik' dan karena 'akibatnya juga baik'.⁶

Jawaban Platon ini, juga merupakan opini publik mengenai keadilan. Dan Glaukon pun menyatakan kesepakatannya terhadap apa yang dikatakan Platon, meskipun kesepakatan ini masih terusik oleh apologi Thrasymakhos atas ketidakadilan. Apologi Thrasymakhos, selain mendapat intervensi dari Glaukon, juga dari Adeimantos dan Sokrates. Intervensi Glaukon, sebagaimana terungkap dalam penjelasannya tentang *cincin Gyges*: seandainya ada dua cincin semacam itu, yang satunya dipakai oleh orang yang adil/benar dan yang satunya dipakai orang yang tidak adil/tidak benar, dipastikan bahwa tidak seorang pun akan bersikap adil. Menurut Glaukon, dalam situasi 'tak terlihat', orang adil maupun tidak adil akan mengambil apa saja yang ia sukai dan sesuai dengan keinginannya.⁷ Dengan demikian, keadilan bukanlah apa yang terbaik baginya. Karena sama seperti orang lain, bilamana ia memiliki kemampuan untuk berbuat 'tidak adil', maka ia akan melakukannya. Orang melakukan keadilan hanya karena dipaksa oleh hukum.

³James Garvey, *20 Karya Filsafat Terbesar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 7.

⁴*Politeia II, 368c-d.*

⁵Frans Magnis-Suseno, *Loc. Cit.*

⁶*Politeia II, 357b-c; 358a.* Lihat juga, A. Setyo Wibowo, *Politeia II*, (Jakarta: Kuliah Politeia – Pascasarjana Driyarkara, 2011), hal. 1. Selanjutnya, kutipan dari bahan kuliah akan ditulis: **ASW, Politeia (buku...) dan halaman.**

⁷*Politeia II, 360b-360c.*

Intervensi lain datang dari Adeimantos, saudara Glaukon. Dengan mengambil posisi pada 'keadilan', mengkritik apa yang dikatakan kebanyakan orang dan khususnya para penyair yang mengatakan bahwa sikap adil, ughari itu baik tetapi tidak menyenangkan, sedangkan ketidakadilan itu menyenangkan dan gampang dilakukan.⁸ Mengutip otoritas moral tradisional yang berbicara tentang 'pahala bagi orang yang hidup adil/benar, Platon mau mengatakan bahwa para dewa pasti akan memberikan pahala (balas jasa yang baik) kepada orang yang hidup adil/benar dengan menganugerahkan hidup yang makmur.⁹ Intervensi Sokrates sehubungan dengan pembicaraan tentang *dikaiosune* dianalogikan dengan 'aksara raya' dan 'aksara kecil', antara 'polis' dan 'jiwa manusia'. Analogi ini diintrodusir Platon dalam pembahasan mengenai 'genealogi polis' untuk melihat proses lahir dan berkembangnya *polis* dan pada akhirnya dapat dilihat bagaimana *keadilan* dan *ketidakadilan* muncul dalam *polis* tersebut. Platon menggambarkan bahwa manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka ia didorong untuk berkumpul, membentuk masyarakat, sehingga muncullah 'hubungan sosial', yaitu melalui spesialisasi tugas masing-masing orang sesuai kemampuannya. Apa yang mau disampaikan Platon tentang 'keadilan' secara umum adalah ketika setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Karena '*our several natures are not all alike but different. One man is naturally fitted for one task, and another for another*'.¹⁰

2.2 Polis-Dikaios

Dengan analogi *polis*, kita dapat mengetahui fakta tentang kehidupan manusia bahwa selain perjuangannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya, manusia pun membutuhkan suatu 'hubungan sosial'. Fakta ini pula yang menjadi dasar bagi tercapainya sebuah keadilan. Sebuah kenyataan yang tentunya terlepas dari sifat teoretis dan spekulatif dari pemeriksaan Platon yang bukan merupakan sebuah rekonstruksi historis mengenai bagaimana sebuah *polis* sungguh-sungguh muncul. Secara singkat dapat dikatakan bahwa konsep keadilan yang ideal dapat lahir, berkembang serta ditemukan dalam sebuah *polis*. Dan bagaimana sebuah *polis* dapat menjadi tempat yang ideal bagi keadilan, dijelaskan Platon dengan membagi masyarakat *polis* ke dalam *tiga kelas* warga (*tri-partisi* Platon), yang terdiri dari: kelas filsuf raja – punggawa (*philosopher king*); kelas tentara (*warriors*); dan kelas petani/pedagang (*workers*). Harmoni antara ketiga golongan ini menggambarkan suasana adil.

Kota yang adil (*Polis – Dikaios*) memang tidak semudah apa yang diidealkan Platon. Platon sendiri mencatat bahwa demi kepentingan masyarakat, di dalam kota yang adil dan baik harus menjalankan tugas yang tepat dengan beberapa program pendidikan, yakni: berkaitan dengan penanaman nilai dan pengajaran, penyiapan tenaga pengawas, seleksi kelas dan propaganda. Dalam dan melalui proses ini, Platon pun berpendapat bahwa kota yang adil hanya akan terjadi jika seorang filsuf menjadi

⁸*Politeia II, 364a.*

⁹*ASW, Politeia II, hal. 7.*

¹⁰*ASW, Politeia II, hal. 10.*

pemimpin.¹¹ Bagi Platon, seorang filsuf akan memimpin dengan kebijaksanaan dan memahami apa makna kebaikan yang sebenarnya. Di samping itu, Platon sendiri mengakui akan adanya “kebohongan”¹² yang dipakai oleh penguasa atau pemimpin demi *polis* (demi kebaikan *polis*).

Ada pertanyaan di sini, bagaimana mungkin sebuah *kota adil*, sebuah *polis ideal*, dapat dibangun di atas dasar masyarakatnya yang terbagi dalam kelas-kelas atau pemimpinnya yang menegaskan suatu kebohongan? Secara sederhana, tentu ada kontradiksi ketika seorang filsuf yang seharusnya mencintai kebenaran harus menggunakan ‘kebohongan’ dalam memerintah sebuah *polis*. Praktek ini, menurut Platon dapat dijustifikasi secara moral. Dan dalam masyarakat yang adil, seorang filsuf (pemimpin yang bijak) akan mengesampingkan kepentingan dirinya demi memperjuangkan keadilan dalam masyarakatnya.

Pertanyaan tentang ‘mungkinkah sebuah polis ideal dapat tercapai’, menjadi gambaran ‘keberatan’ dari Polemarkhos dan Adeimantos terhadap apa yang diungkapkan Sokrates. Mereka meminta Sokrates untuk memberi penjelasan lanjut tentang *polis ideal*, terutama menyangkut ‘komunitas’ (*koinonias*), yang di dalamnya terdapat unsur ‘komunisme’ dan soal ‘pendidikan bagi anak-anak’.¹³ Rumusan keberatan ini akan bermuara pada satu tujuan (berdasarkan jawaban Sokrates atas keberatan-keberatan), di mana *polis ideal* yang dimaksud adalah *polis yang adil*, yang di dalamnya terdapat *individu-individu yang adil*, baik lelaki maupun wanita, yang terintegrasi dalam kelompok para punggawa dan berproses melalui pendidikan yang sama, yaitu melalui pendidikan musik dan gimnastik;

“Is it possible, then, to employ an animal for the same tasks as another if you do not give it the same upbringing and education?”

Then if we employ women for the same tasks as men, they must also be taught the same things.

*Now, we gave the latter musical and physical training”.*¹⁴

Ada tiga gelombang keberatan,¹⁵ yang muncul dari usulan-usulan revolusioner Platon: *Pertama*, keberatan terhadap komunitas “lelaki dan wanita punggawa dalam satu fungsi mereka” (Soal integrasi kaum wanita dalam kelompok punggawa – 451c-457b). Pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah apakah ‘wanita’ tidak memiliki *nature* untuk masuk dalam kelompok punggawa? Platon memberikan jawaban dengan menekankan bahwa lelaki maupun wanita memiliki bakat natural (*hai phuseis*) yang sama untuk menjadi punggawa (orang yang memerintah);¹⁶

“There is no pursuit relevant to the management of the city that belongs to a woman because she is a woman, or to a man because he is a man; but the various natural

¹¹James Garvey, *Op, Cit.*, hal. 8-9. Bdk. *Politeia VI, 502c-541b*; ‘Philosophers in the good city’.

¹²‘Kebohongan’ yang dimaksud Platon adalah ‘noble lie’ (*Politeia III, 414c*), berhadapan dengan kesulitan seorang pemimpin dalam meyakinkan orang-orang (kelas bawah) yang tidak terbiasa dengan ‘wacana dialektis/filosofis’.

¹³*Politeia V, 449c-d.*

¹⁴*Politeia V, 451e-452a.*

¹⁵*ASW, Politeia V*, hal. 2.

¹⁶*Politeia V, 455d.*

capacities are distributed in a similar way between both creatures, and women can share by nature in every pursuit, and man in every one, though for the purposes of all of them women are weaker than men”.

Kedua, keberatan terhadap komunitas wanita dan anak-anak (457b-466d). Melalui pernyataan: *wanita dan anak akan menjadi ‘milik bersama’* – adakah unsur *komunisme* di sini? Platon menjawab bahwa ada aturan hukum dalam *polis ideal* tersebut; yang mengatur soal pencarian pasangan, perkawinan, dan seleksi bagi kelahiran anak. Di samping itu, terdapat berbagai aturan tentang kehidupan dalam *polis*. Satu keinginan Platon dari *polis ideal* tersebut adalah adanya keadilan dan kedamaian, maka untuk segala potensi perpecahan dan perang mesti dihindarkan. *Ketiga*, pertanyaan besar soal apakah *polis ideal* seperti ini bisa direalisasikan dalam kenyataan dan soal usulan tentang para *filosuf raja* (471c dan seterusnya). Tentang realisasi *polis ideal*, Platon memprioritaskan *logos* atas *konkretisasi*.¹⁷ Hal yang mungkin bagi Platon adalah proses imitasi atau partisipasi. Maka *polis ideal* hanyalah sebuah *city in speech*. Demikian kenyataannya, bukan berarti bahwa usulan tentang para *filosuf raja* ditinggalkan. Platon sendiri masih berbicara soal munculnya para *filosuf raja* berkat *inspirasi illahi, doa* atau *museos*.¹⁸

Sebuah kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan keberatan-keberatan dan tanggapan atasnya: bahwa *polis ideal* adalah *polis yang adil (dikaioi)* dan terlepas dari *polis ideal* ini hanya merupakan wacana, akan tetapi sebuah *polis* akan menjadi *polis yang adil* apabila pemimpinnya adalah para *filosuf raja*. Seorang ‘*filosuf*’ menurut Platon adalah orang yang membebaskan diri dari kungkungan belenggu karena ia sampai pada pencerahan atau pengetahuan tentang kenyataan yang ada dalam dunia ide.

2.3 Individu-Dikaioi

Penjelasan tentang kota yang adil, di mana di dalamnya terdapat tiga kelas yang melaksanakan perannya masing-masing tanpa mencapuri urusan kelas yang lain, menjadi dasar untuk memahami keadilan dalam setiap individunya. Bahwa dalam setiap individu adil terdapat struktur yang sama, yaitu: *Nous/Rasio* – *Thumos/Spirituality* – *Epithumia/Nafsu yang rendah*, yang dalam relasinya dengan orang lain akan dipimpin oleh rasionya sehingga individu tersebut terbebas dari konflik. Dan meskipun kompleksitas aspek psikologis manusia tidak dapat direduksi ke dalam ketiga aspek berdasarkan analogi Platon ini, namun keseajarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Demikian menurut Platon bahwa individu yang adil adalah individu yang paling bahagia dan kota yang adil dihuni oleh individu-individu yang paling bahagia.¹⁹

Apa yang mau dijelaskan Platon tentang *individu adil* dengan menggunakan analogi trilogi di atas, pada prinsipnya mau menekankan bahwa individu yang adil adalah individu yang sanggup menjaga keseimbangan antara *thumos* dan *epithumia* dengan *rasio*-nya. Dengan *rasio* ini, seseorang akan dibimbing menuju kebahagiaan,

¹⁷*Politeia V, 473a.*

¹⁸*ASW, Politeia V*, hal. 14.

¹⁹James Garvey, *Op. Cit.*, hal. 16.

karena tugas rasio adalah menghantar orang pada cinta akan kebijaksanaan. Rasio memberi pertimbangan yang terbaik ketika dalam diri manusia muncul keinginan untuk memuaskan nafsu dan cinta akan kehormatan. Rasiolah yang akan mengatur bagian-bagian jiwa yang lain, dan dengan demikian manusia akan bersikap dan bertindak adil.

Di kelas *rasio*, bagi Platon merupakan tempatnya ‘para filsuf raja’, yang dipilih dari anak-anak dengan bakat alamiah yang khusus yang nantinya akan menjadi orang-orang yang membaktikan dirinya pada filsafat dan politik. Mereka akan dididik sedemikian sehingga dapat menjadi orang yang adil, bermoral dan mempunyai pengetahuan khusus tentang intelligibel. Mereka dilatih untuk menjadi ‘individu-individu adil’ sehingga dalam hidup mereka politik dan filsafat menjadi suatu irama kehidupan, suatu model hidup. Apa yang digambarkan dalam alegori goa; seorang ‘filsuf’, setelah melihat matahari di luar goa, ia diminta untuk kembali ke dunia bawah, yaitu kembali ke *polis*, kembali ke politik.

Individu-individu yang adil inilah yang diharapkan akan mengisi dan berada dalam *polis ideal*. Individu-individu adil yang dimaksud di sini adalah para filsuf raja; mereka yang memiliki ‘*the nature of philosophers*’ (*phusis*),²⁰ [...it is first necessary to understand the nature of philosophers. And I think that if we agree sufficiently about that, we will also agree that the same people can have both qualities, and that they alone should be leaders in cities], mereka yang terseleksi dan yang akan memimpin *polis ideal*. Para filsuf raja yang dipikirkan Platon bukanlah ‘*the best king*’ bila diperbandingkan dengan raja-raja yang ada, melainkan ‘raja dalam arti pemimpin sistem tripartit’ sehingga raja-raja di situ mewakili ideal keadilan/kebenaran dalam *polis* dan *jiwa*.²¹ Para punggawa adalah raja-raja tersebut dan kelompok ini menjadi semacam *aristokrasi* yang akan memerintah berdasarkan keutamaan dan keadilan;

*“I will tell you that one type would be the constitution we have been describing. However, there are two ways of referring to it: if one out-standing man emerges among the rulers, it is called a kingship; if more than one, it is called an aristocracy.”*²²

2.4 Keadilan: Sebuah Pencarian

Salah satu keutamaan pokok²³ adalah keadilan (*dikaisoune*), yakni efek yang muncul manakala tiap bagian jiwa menjalankan tugas masing-masing. Dalam konsepsi Platon, efek ini pun muncul di bawah peran rasio. Bila rasio memerintah, maka setiap bagian dari jiwanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, baik dalam soal memerintah maupun mentaati perintah. Rasio menjadi titik berangkat bagi pencapaian jiwa yang adil (*dikaios*).²⁴ Bagi Sokrates, bila seseorang sungguh-sungguh *dikaios*,

²⁰*Politeia VI, 485a.*

²¹*ASW, Politeia V*, hal. 15.

²²*Politeia IV, 445d.*

²³Menurut Sokrates dan Platon ada empat keutamaan pokok: *sophrosune/ugahari, andreia/keberanian, sophia/pengetahuan-kebijaksanaan* dan *dikaisoune/keadilan*. Lihat, A. Setyo Wibowo, **Areté: Hidup Sukses Menurut Platon**, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 90.

²⁴*Ibid.*, hal. 92.

maka *ergon* manusia seperti itu tidak akan pernah menyakiti orang lain (bertindak tidak adil).

Menyelidiki *keadilan* dalam sebuah pencarian, Sokrates yang telah memulainya dengan pertanyaan dasar ‘apa itu keadilan?’, juga pada akhirnya memberi keyakinan kepada Glaukon bahwa usulan-usulan ‘revolusioner’ dalam *polis ideal* diharapkan nantinya menjamin dan tidak terlepas dari soal ‘keadilan’ (*justice*). Dengan cara bertanya yang khas dan jawaban yang jarang sampai pada final, Sokrates mau menunjukkan bahwa sebuah jawaban harus selalu diuji dan dipertanyakan, dan oleh karenanya tidak dapat diandalkan sebagai jawaban ‘final’. Pencarian pun hanya sebatas mengetahui ciri atau sifat umum yang bisa dipercaya bahwa ada sesuatu yang disebut ‘keadilan’, yang keberadaannya benar-benar nyata meskipun tidak bersifat material.²⁵

Pernyataan Sokrates di atas, membantu penyelidikan ini dalam menggunakan data-data umum yang diketahui untuk mengungkapkan bahwa ada keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam *polis ideal* (*kota yang adil* yang diidealkan Platon) dan yang melahirkan *individu-individu adil*. Usaha pencarian ini pun tidak terlepas dari metode yang digunakan, yaitu *dialektika*. Sokrates membangun sebuah prinsip bahwa segala sesuatu harus terbuka untuk dipertanyakan. Prinsip ini telah melahirkan metode *dialektika*, yaitu metode untuk mencari kebenaran melalui proses tanya jawab. Platon meneruskan metode ini,²⁶ karena metode *dialog* berupaya menggali hakikat hal-hal melalui proses pernyataan dan kontradiksi. Dialog Platon dapat juga dimengerti sebagai salah satu langkah untuk membuka kesadaran bahwa gaya hidup yang bermutu, yang menuju ke kebahagiaan, tidak tercapai melalui egoisme dan pemuasan nafsu, melainkan dengan mengangkat diri pada nilai-nilai abadi. Hal mana tergambar dalam perdebatan yang melibatkan keberatan-keberatan dan tanggapan yang terjadi antara Sokrates dan lawan-lawan bicaranya, menuju suatu keyakinan akan suatu keadilan/kebenaran yang diidealkan Platon dalam *polis ideal* dan individu-individu adil, yakni para punggawa yang akan memimpin *polis ideal* tersebut. Di samping itu, terdapat beberapa *analogi* yang juga digunakan Sokrates untuk memberi kejelasan terhadap setiap persoalan yang ingin dicari hakikat terdalamnya.

3. Kesimpulan

Polis ideal yang diusulkan Platon memang masih merupakan sesuatu yang berada dalam ‘kemungkinan’ (*possibility*);²⁷

‘The good city is possible if and only if virtuous and expert rule by its leaders is possible;
Virtuous and expert rule is possible if and only if the rulers may be philosophers; Rule
by philosophers is possible; The good city is possible.

²⁵Bryan Magee, *The Story of Philosophy*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hal. 21-22.

²⁶Ted Honderich (ed.), *The Companion to Philosophy*, (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 198. Lihat juga, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 162-163.

²⁷‘The possibility of the city’. Nickolas Pappas, *Routledge Philosophy Guide to Plato and the Republic*, (London: Routledge, 1995), hal. 110-111.

Berada dalam kondisi historis sistem demokrasi yang banyak menunjukkan ketidakadilan, juga catatan historis tentang para raja yang pernah ada, telah ‘melahirkan’ seorang Platon dengan ide-ide revolusioner atau usulannya yang sangat berbeda dari kondisi jamannya. Platon menginginkan ‘keadilan’/’kebenaran’. Apa yang mau ditekankan Platon dalam polis ideal dengan para punggawanya adalah bahwa hidup adil itu mengandaikan watak dan nalar yang lebih unggul, dan tidak sulit untuk memperlihatkan bahwa hidup adil itu lebih baik daripada hidup tidak adil yang mengandaikan ketidakpengetahuan dan kebodohan; dan ini mesti jelas bagi siapa saja.

Ketidakmungkinan yang terungkap dari *polis ideal*, tidak serentak menutup kemungkinan bagi tercapainya ‘*the good city*’ ala Platon. Dengan kondisi segala aturan yang diciptakan untuk mengatur kehidupan di dalam *polis*, dan seleksi para punggawa berdasarkan *nature*-nya yang akan menjadi ‘penguasa’ berdasarkan keutamaan dan keadilan, sungguh merupakan suatu hal yang bukan mustahil bagi terealisirnya ideal Platon ini.

Platon menawarkan konsep masyarakat yang utopis dengan sebuah masyarakat yang dipimpin oleh ‘kelas elit’ (*para punggawa*) yang telah dididik sejak lahir untuk menjadi pemimpin. Secara umum, konsep ini menggambarkan suatu masyarakat ideal, yakni masyarakat yang mengetahui bakatnya dan menyumbangkannya bagi kebaikan umum. Kurangnya perhatian pada konsep kebebasan dan hak individu dalam konsep *polis ideal*, karena semuanya akan dikontrol oleh para punggawa, telah mendatangkan tuduhan bahwa konsep Platon ini mengilhami model pemerintahan sosio-komunis.

Atau, dalam tafsir ‘minimalis’ dari Leo Strauss tentang *polis ideal*, yang melihat kekurangan-kekurangan ini dan cenderung mengatakan bahwa ada banyak hal yang ‘tidak dikatakan’ dan banyak rahasia itu hanya disampaikan Platon kepada ‘lingkaran dalam’ (*murid-muridnya*). Artinya, buku *politeia* sebenarnya hanya menuliskan ‘sebagian kecil’ dari keseluruhan proyek politis Platon yang sesungguhnya (yang tentunya sangat revolusioner).²⁸

Pendapat Platon tentang ‘individu’ manusia (secara umum dalam tripartitnya), terbentuk dari tiga unsur yang saling bertentangan: nafsu, akal budi dan kehendak. Gagasan ini diterapkan oleh Platon untuk menerangkan perihal masyarakat (dalam *polis ideal*-nya). Dalam konsep masyarakat ideal ini, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa ada tenaga pendukung (*auxiliaries* – kelas polisi penengah), yang berfungsi menjaga agar rakyat tetap teratur menurut petunjuk kelas penguasa yang memiliki pengetahuan filosofis dan bertindak sebagai pelindung masyarakat. Kelas penguasa inilah yang oleh penulis dipikirkan sebagai ‘*individu-individu adil*’ (*individu – dikaios*) di dalam *polis*.

²⁸ASW, *Politeia V*, hal. 16.

Daftar Pustaka

- A. Setyo Wibowo, *Areté: Hidup Sukses Menurut Platon*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- A. Setyo Wibowo, *Politeia*, Jakarta: Kuliah Politeia – Pascasarjana Driyarkara, 2011.
- A. Setyo Wibowo, *Tokoh-Tokoh, Waktu Dramatis dan Penulisan Politeia*, Jakarta: Kuliah Politeia – Pascasarjana Driyarkara, 2011.
- Bryan Magee, *The Story of Philosophy*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- C.D.C. Reeve (trans), *Plato: Republic*, Hackett Publishing Company, Inc., 2004.
- Frans Magnis-Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- James Garvey, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nickolas Pappas, *Routledge Philosophy Guide to Plato and the Republic*, London: Routledge, 1995.
- Ted Honderich (ed.), *The Companion to Philosophy*, New York: Oxford University Press, 1995.

